

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Redi, *Prosiding Workshop: Freeport Quovadis?*, (Jakarta, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, 2017)

Andrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012.)

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006)

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2006)

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.)

M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011.)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).

N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya, Yuridika, 1993.)

Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press)

Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodelogi Penulisan Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990)

Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juri Metri* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988).

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo)

Salim H.S., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2008)

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014)

B. Jurnal

Ahmad Redi, “*Dilema penegakan hukum penambangan mineral dan batubara tanpa izin pada pertambangan skala kecil*” (Jurnal Rechtsvinding Vol.5, Nomor 3, Desember 2016)

Chyntia dan Kartika, *Urgensi Pembangunan Smelter oleh Perusahaan Tambang di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ismail Saleh, Nisa Restika, dan Septiana, *Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bagi Sektor Pertambangan Batubara*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Muhamad Azhar dan Suhartoyo, *Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indoensia*, (Jurnal Law Reform Vol.11, Nomor 1, Tahun 2015)

Muhamad Azhar, *Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant di Kabupaten Bojonegoro*, (Administrative & Governance Journal Vol.11, Edisi 2, Mei 2018)

C. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan pertama atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2017 Perubahan Atas Permen No. 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Putusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara.